PEMBERDAYAAN LANSIA TERLANTAR DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA JAMBI

Sabrina Rizkiani Az Zahra
NPP. 33.0210
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: sabrinarazhra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Abdurohim, S.Sos., M.Si
Email: abdurohim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The increase in the elderly population (ageing population) in Indonesia has led to a rise in the number of neglected elderly. Jambi City has the highest number of neglected elderly in Jambi Province (832 people in 2024), yet studies specifically examining the influence of socio-economic and cultural factors on youth participation in literacy programs remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the empowerment of neglected elderly in improving their independence by the Social Services Agency in Jambi City.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach under the post-positivism paradigm. Data were collected through in-depth interviews with 12 informants (selected via purposive sampling, including the Head of Agency, Head of Social Rehabilitation Division, Social Workers, beneficiaries, and community leaders), observation, and documentation. Data validity was tested through source triangulation, technique triangulation, and member check. Analysis was conducted using the 5P empowerment theory (Edi Suharto, 2017) through data reduction, display, and verification stages, carried out over two months in Jambi City.* ***Result:*** *The study found that empowerment has been implemented but is not yet optimal: (1) Enabling: objectives are clear but data collection is not comprehensive; (2) Strengthening: activities are constrained by limited HR and budget; (3) Protection: facilities have insufficient capacity; (4) Supporting: budget is not proportional to the growth of the elderly population; (5) Fostering: long-term intensive assistance needs improvement. Conclusion: Empowerment of the neglected elderly by the Social Services Agency in Jambi City has been implemented but is not fully optimal. This study concludes that strengthening the RT-based data system and revitalizing community-based elderly groups are essential.*
Keywords: *Empowerment; Neglected Elderly; Independence*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Peningkatan populasi lanjut usia (ageing population) di Indonesia berdampak pada bertambahnya jumlah lansia terlantar. Kota Jambi memiliki jumlah lansia terlantar tertinggi di Provinsi Jambi (832 jiwa pada tahun 2024), namun kajian yang secara khusus mengkaji pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan kultural terhadap partisipasi pemuda dalam program literasi masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pemberdayaan lansia terlantar dalam meningkatkan kemandirian oleh Dinas Sosial di Kota Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam paradigma post-positivism. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 12 informan (diplih dengan purposive sampling, terdiri dari Kepala Dinas, Kabid Rehabilitasi Sosial, Penyuluh Sosial, penerima manfaat, dan tokoh masyarakat), observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Analisis data menggunakan teori pemberdayaan 5P Edi Suharto (2017) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, yang dilaksanakan selama dua bulan di Kota Jambi. **Hasil/Temuan:** Penelitian menemukan bahwa pemberdayaan telah berjalan namun belum optimal: (1) Pemungkinan: tujuan jelas namun pendataan belum menyeluruh; (2) Penguatan: kegiatan terkendala SDM dan anggaran; (3) Perlindungan: kapasitas sarana belum memadai; (4) Penyokongan: anggaran belum proporsional; (5) Pemeliharaan: pendampingan jangka panjang perlu ditingkatkan. Kesimpulan: Pemberdayaan lansia terlantar oleh Dinas Sosial di Kota Jambi telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem data berbasis RT dan revitalisasi kelompok lansia berbasis komunitas sangat diperlukan.
Kata kunci: Lansia Terlantar; Pemberdayaan; Kemandirian

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemerintahan memiliki berbagai fungsi yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi fundamental pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya kelompok rentan seperti lanjut usia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya dalam menciptakan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pemberdayaan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Widjaja, 2012).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan dirinya sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Strategi pendekatan pemberdayaan ini menjadi penting karena akar permasalahan seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan, ketidakadilan bersumber dari ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri (Suaib, 2023).

Pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya menjamin kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia). Lansia adalah individu yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas yang mengalami penurunan kondisi fisik maupun psikis (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998). Menurut Bloom dkk. dalam TNP2K (2020), tiga faktor utama yang menyebabkan lansia rentan adalah ketidakproduktifan ekonomi, masalah kesehatan, dan kebutuhan pendamping.

Menurut *World Health Organization* (*WHO*, 2015), lansia (*older persons*) didefinisikan sebagai individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. *WHO* menggunakan batas usia ini secara global sebagai standar dalam berbagai laporan mengenai penuaan penduduk (*ageing population*) dan kesehatan lanjut usia. Miller (2012) dalam *Nursing for Wellness in Older Adults* menjelaskan bahwa lansia adalah individu yang mengalami proses penuaan normal dengan berbagai perubahan yang memengaruhi fungsi optimal tubuh, namun masih memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan.

Fenomena penuaan penduduk (ageing population) menjadi tantangan global. Berdasarkan data *United Nations* (2019), jumlah penduduk lansia dunia mencapai 1 miliar pada tahun 2019 dan diperkirakan menjadi 2,1 miliar pada tahun 2050. Indonesia telah memasuki era ageing population sejak

tahun 2021, dengan proporsi lansia meningkat dari 8,43% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 20,31% pada tahun 2045 (BPS, 2024). Peningkatan ini berdampak pada munculnya kelompok lansia terlantar, yaitu lansia yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya baik jasmani maupun rohani karena faktor usia dan minimnya dukungan keluarga.

Bahrudin dan Hamid (2025) menyatakan bahwa lansia terlantar disebabkan oleh ekonomi rendah, minimnya perhatian keluarga, dan bergesernya nilai sosial di masyarakat modern. Hadipranoto et al. (2020) mengidentifikasi empat faktor penyebab: masalah keuangan, perpisahan dengan pasangan, tidak memiliki keluarga, serta keterpaksaan tinggal di panti karena ekonomi dan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan merupakan salah satu fungsi fundamental (Ndraha, 2011). Pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberdayakan kelompok rentan melalui urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) huruf f). Pemberdayaan lansia terlantar bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan lansia agar dapat hidup bermartabat.

Provinsi Jambi menghadapi tantangan serius dalam hal ini. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi mencatat populasi lansia tertinggi (62.292 jiwa). Kota Jambi sebagai kota dengan jumlah lansia terlantar tertinggi di antara 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi pada tahun 2024 (Dinas Sosial Provinsi Jambi, 2024), yaitu 832 orang pada tahun 2024, menempati peringkat teratas di antara kabupaten/kota lainnya. Tingginya angka lansia terlantar di Kota Jambi menunjukkan adanya kerentanan sosial dan kegagalan sistem perlindungan sosial bagi kelompok lansia tersebut. Kelompok usia lansia dengan golongan rentan atau terlantar tercatat pada Dinas Sosial Kota Jambi. Masih ditemukan banyak lansia terlantar yang membutuhkan perhatian khusus, baik melalui panti lansia, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, maupun program pemberdayaan. Kondisi ini menunjukkan urgensi program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kemandirian lansia terlantar. Data Dinas Sosial Kota Jambi menunjukkan tren peningkatan lansia terlantar yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2024. Salah satu kasus representatif adalah Bapak Tabrin (72 tahun) yang tinggal sebatang kara dan memulung barang bekas untuk bertahan hidup.

Fenomena lansia terlantar ini dapat dipahami melalui kerangka teori kerentanan sosial (social vulnerability) yang dikemukakan oleh Wisner et al. (2004), yang menekankan pada interaksi antara faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan dalam menciptakan kondisi risiko bagi kelompok rentan. Dalam konteks lansia terlantar, kerentanan ini berbentuk keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sistem jaminan sosial yang memadai (kerentanan ekonomi), lemahnya jaringan dukungan sosial maupun keluarga (kerentanan sosial), dan keterbatasan kapasitas dan cakupan layanan perlindungan sosial (kerentanan institusional).

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial memiliki motto "DINSOS HADIR, PPKS SEJAHTERA" dan berencana membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) khusus lansia (ANTARA News Jambi, 2025). Namun demikian, pemberdayaan lansia terlantar masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Ningtihana et al. (2021) menunjukkan bahwa bantuan insentif tunai menjadi strategi utama di Kota Batu. Penelitian Wahyuni et al. (2023) menekankan pentingnya dimensi enabling, empowering, dan protecting. Sementara itu, penelitian Rusmiyati (2020) menyoroti pentingnya jaminan sosial bagi lansia. Namun, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan teori pemberdayaan 5P Edi Suharto (2017) secara komprehensif di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan lansia terlantar dalam meningkatkan kemandirian oleh Dinas Sosial di Kota Jambi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan meningkatnya jumlah lansia terlantar di Kota Jambi yang mencapai 832 orang pada tahun 2024, dengan tren peningkatan hampir setiap tahun sejak 2018,

sementara kapasitas kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi belum sepenuhnya mampu merespons dinamika tersebut secara optimal.

Secara konseptual, belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan teori pemberdayaan Edi Suharto (2017) dengan kelima dimensinya (pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan) untuk mengukur tingkat pemberdayaan lansia terlantar di Kota Jambi. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada strategi bantuan insentif (Ningtihana et al., 2021), peran dinas sosial (Putri, 2022), atau program spesifik di lokus yang berbeda (Wahyuni et al., 2023; Azidan et al., 2023).

Selain itu, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi seharusnya memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang lebih memadai, namun angka lansia terlantar justru tertinggi, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kapasitas institusional dan hasil yang dicapai. Tren data menunjukkan peningkatan jumlah lansia terlantar di Kota Jambi yang konsisten selama periode 2018-2024, berbeda dengan beberapa kabupaten lain yang menunjukkan fluktuasi. Penelitian di tingkat provinsi akan memiliki cakupan terlalu luas, sehingga Dinas Sosial Kota Jambi sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung menjadi lokus yang paling relevan untuk menghasilkan rekomendasi konkret. Meskipun berbagai studi telah membahas kinerja Dinas Sosial , masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji pemberdayaan lansia terlantar menggunakan teori pemberdayaan 5P Edi Suharto (2017) di Kota Jambi, terutama dalam memahami dinamika kolaborasi lintas sektor dan efektivitas program di tingkat lapangan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pemberdayaan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kota Jambi berdasarkan lima dimensi teori pemberdayaan yang komprehensif. Hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan perumusan strategi oleh pemerintah setempat dalam peningkatan kemandirian lansia terlantar di tengah berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, banyaknya lansia tanpa identitas kependudukan, stigma sosial, dan hambatan komunikasi.

Penelitian ini penting mengingat Kota Jambi mencatat jumlah lansia terlantar tertinggi di Provinsi Jambi dengan tren peningkatan yang konsisten, sementara kapasitas kelembagaan Dinas Sosial belum sepenuhnya optimal. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami kesenjangan antara kapasitas kelembagaan dan kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya, perumusan strategi pengembangan program pemberdayaan lansia berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, sehingga upaya peningkatan kemandirian lansia terlantar dapat berjalan kurang optimal bahkan berpotensi stagnan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pemberdayaan lansia terlantar, kesejahteraan sosial lanjut usia, serta program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan variasi fokus, metode, pendekatan teoritis, serta lokus penelitian yang berbeda-beda.

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: Asmorowati, Schubert, & Supeno (2024) dalam jurnal *International Journal of Sociology and Social Policy* mengkaji ketegangan antara kapasitas tata kelola dan konseptualisasi perawatan lansia di panti jompo Indonesia. Penelitian kualitatif yang dilakukan di Jawa Timur ini menemukan bahwa sistem perlindungan sosial di Indonesia mengalami *stretching beyond capacity* atau keterbatasan kapasitas dalam merespons peningkatan jumlah lansia yang terus bertambah setiap tahunnya. Temuan ini relevan karena

menggambarkan tantangan struktural yang juga dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam menangani lansia terlantar. Selain itu, Penelitian internasional seperti Hariastuti et al. (2024) tentang *Elderly Golden Age School* berfokus pada promosi kesehatan berbasis sekolah, sementara penelitian ini berfokus pada pemberdayaan sosial berbasis komunitas. Sahar et al. (2018) meneliti kelompok swadaya di Jakarta, berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis peran Dinas Sosial sebagai aktor utama. Suwana & Lily (2017) tentang literasi media digital dan Suwarni et a bl. (2026) tentang model 5I juga berbeda fokus karena penelitian ini lebih menekankan pada aspek perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlantar.

Penelitian lain dilakukan oleh Ningtihana, Cikusin, & Abidin (2021) yang mengkaji strategi Dinas Sosial Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar di Kelurahan Sisir. Penelitian kualitatif deskriptif ini menemukan bahwa strategi utama yang digunakan adalah pemberian bantuan insentif tunai sebesar Rp500.000 per bulan yang terbukti efektif membantu kesejahteraan lansia, meskipun masih terkendala oleh kuota penerima yang terbatas dan pemanfaatan dana oleh keluarga yang tidak selalu tepat sasaran. Berbeda dengan lokus penelitian tersebut, penelitian ini berlokus di Kota Jambi dengan pendekatan teori pemberdayaan 5P yang lebih komprehensif.

Selanjutnya, Wahyuni, Fitri, & Fauzi (2023) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan lansia terlantar melalui Program Istana Lansia Serambi Madinah Dinas Sosial Kota Solok menggunakan tiga dimensi strategi pemberdayaan, yaitu *enabling* (penciptaan iklim yang memungkinkan melalui motivasi, pemenuhan kebutuhan, dan keterbukaan informasi), *empowering* (penguatan kapasitas melalui sarana-prasarana, pelatihan memasak, dan pelayanan kesehatan), serta *protecting* (perlindungan melalui hukum dan regulasi). Penelitian ini relevan karena menggunakan kerangka pemberdayaan yang serupa, namun penelitian ini akan melengkapi dengan dua dimensi tambahan dari teori 5P Edi Suharto yaitu penyokongan (*supporting*) dan pemeliharaan (*fostering*) yang belum tercakup dalam penelitian tersebut.

Penelitian oleh Azidan, Islami, & Niko (2023) tentang pemberdayaan lansia terlantar di Rumah Bahagia Embung Fatimah Kota Tanjungpinang menemukan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), pelayanan kesehatan, serta penugasan petugas piket yang menjaga lansia secara bergantian. Penelitian ini berlokus di panti sosial, berbeda dengan penelitian ini yang berlokus pada Dinas Sosial sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih luas dalam perencanaan dan penganggaran program.

Penelitian oleh Mujiadi, Laga, Sari, & Rachmah (2024) mengkaji optimalisasi Posyandu Lansia melalui program pemberdayaan masyarakat di Mojokerto. Menggunakan pendekatan partisipatif, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi posyandu lansia dilakukan melalui pelatihan kader, pendampingan, dukungan dana desa dan swasta, penyediaan transportasi jemputan lansia, pemeriksaan kesehatan rutin, serta pemberian makanan tambahan. Penelitian ini berbeda fokus karena menekankan pada posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan lansia, sementara penelitian ini berfokus pada pemberdayaan holistik oleh Dinas Sosial.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian-penelitian tersebut, antara lain: (1) belum banyak yang menggunakan teori pemberdayaan 5P Edi Suharto secara komprehensif; (2) lokus penelitian di Kota Jambi yang memiliki jumlah lansia terlantar tertinggi se-Provinsi Jambi masih sangat terbatas; (3) penelitian yang mengintegrasikan perspektif kebijakan (Dinas Sosial) dan perspektif penerima manfaat (lansia terlantar) masih jarang dilakukan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pemberdayaan lansia terlantar di Kota Jambi menggunakan teori 5P Edi Suharto (2017) yang mencakup pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan enelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada tiga aspek. Pertama, dari segi teori: penelitian ini merupakan yang pertama mengaplikasikan teori pemberdayaan 5P Edi Suharto secara holistik dan komprehensif—meliputi enabling, empowering, protecting, supporting, dan fostering—dalam konteks pemberdayaan lansia terlantar di Kota Jambi. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan sebagian dimensi atau teori yang berbeda. Kedua, dari segi lokus dan karakteristik objek: Kota Jambi sebagai kota dengan jumlah lansia terlantar tertinggi di Provinsi Jambi memiliki karakteristik yang belum pernah diteliti, khususnya paradoks antara kapasitas kelembagaan ibukota provinsi dengan tingginya angka ketelantaran. Ketiga, dari segi kontribusi kebijakan: penelitian ini menghasilkan analisis berbasis semua dimensi pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan program yang lebih terstruktur oleh Dinas Sosial Kota Jambi.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam meningkatkan kemandirian di Kota Jambi, Provinsi Jambi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan paradigma *post-positivism*

. Pendekatan ini dipilih karena pemberdayaan lansia terlantar merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat diukur semata-mata melalui angka, melainkan memerlukan pemahaman mendalam terhadap proses, dinamika, dan konteks kelembagaan yang melatarinya. Paradigma post-positivism dipilih karena fakta sosial dalam pelayanan publik bersifat intangible dan sangat dipengaruhi oleh ruang, waktu, dan situasi sosial yang melatarbelakanginya (Sundaro, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: (1) Observasi partisipasi pasif di Dinas Sosial Kota Jambi dan rumah singgah lansia; (2) Wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 12 informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Penyuluh Sosial Ahli Muda, 2 Staf Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial, 5 Penerima Manfaat (Lansia Terlantar), Camat Kota Baru, dan Lurah Kenali Asam; dan (3) Dokumentasi berupa dokumen resmi, laporan kinerja, dan data DTKS. Informan kunci adalah Kepala Dinas Sosial Kota Jambi karena memiliki otoritas kebijakan dan pemahaman menyeluruh terhadap program pemberdayaan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana, dan penerima manfaat) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) (Sedarmayanti & Hidayat, 2011). Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles et al. (2005) yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data

(menyederhanakan, mengelompokkan, merangkum data), penyajian data (menyusun informasi secara terstruktur dalam bentuk uraian singkat), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan sebelum, selama, dan setelah di lapangan (Simangunsong, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan pertimbangan bahwa instansi ini merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan lansia terlantar di tingkat kota. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2026 sesuai dengan kalender akademik IPDN Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pemberdayaan lansia terlantar dalam meningkatkan kemandirian oleh Dinas Sosial Kota Jambi menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto (2017) yang mencakup lima dimensi: pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*fostering*).

3.1. Pemungkinan (*Enabling*)

Pemungkinan merupakan dimensi pemberdayaan yang bertujuan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Dalam konteks lansia terlantar, pemungkinan diwujudkan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan lansia mengakses layanan sosial, memperoleh identitas kependudukan, serta berpartisipasi dalam program-program pemerintah (Suharto, 2017).

Tabel 1.
Kejelasan Tujuan dan Strategi Pemberdayaan Lansia Terlantar

Indikator	Temuan
Kejelasan Tujuan	Memastikan lansia terlantar mendapatkan layanan sosial layak melalui rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.
Indikator Keberhasilan	Jumlah lansia yang berhasil dirujuk, mendapat layanan BPJS, dan memiliki identitas kependudukan.
Strategi Utama	Kolaborasi lintas sektor (BPJS, Baznas, LKS, Dinas Kesehatan) dan program Lansia Bahagia.

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, tujuan utama pemberdayaan adalah memastikan lansia terlantar mendapatkan layanan sosial yang layak, baik melalui rehabilitasi, pemberdayaan, maupun perlindungan sosial. Keberhasilan diukur dari jumlah lansia yang berhasil dirujuk, mendapat layanan kesehatan (BPJS), dan memiliki identitas kependudukan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menambahkan bahwa indikator keberhasilan meliputi lansia yang berhasil dipetakan (mana yang bisa diberdayakan, mana yang perlu perlindungan), jumlah yang berhasil masuk panti, serta perubahan kondisi sosial dan kesehatan yang terukur melalui monitoring berkala tiap 6 bulan.

Strategi yang digunakan meliputi kolaborasi lintas sektor dengan BPJS, Baznas, LKS, Dinas Kesehatan, serta memanfaatkan program dari berbagai OPD seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk pelatihan. Selain itu, program Lansia Bahagia dari Wali Kota Jambi dijalankan sebagai pendekatan

berbasis komunitas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suwarni et al. (2026) bahwa model promosi kesehatan terintegrasi 5I (Identifikasi, Intervensi, Integrasi, Kolaborasi, dan Keberlanjutan) efektif meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup lansia di Indonesia. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menegaskan bahwa strategi yang digunakan adalah memanfaatkan berbagai celah anggaran dan program lintas instansi. Meskipun anggaran terbatas, hasil tetap dimaksimalkan dengan melibatkan potensi komunitas seperti Komunitas Lansia (Komra Lansia) yang sebelumnya ada dan sangat membantu, meskipun kini sudah tidak aktif lagi.

Tabel 2.
Perencanaan dan Penyusunan Program Pemberdayaan Lansia Terlantar

Aspek Perencanaan	Mekanisme
Proses Perencanaan	Asesmen terhadap lansia yang dilaporkan masyarakat atau ditemukan di lapangan
Alur Penanganan	Lansia berdaya → bidang pemberdayaan; sakit → bidang perlindungan; perawatan intensif → rujukan panti melalui LKS
Langkah Awal	Layanan kesehatan, pembuatan identitas kependudukan, perencanaan rujukan
Usulan Pengembangan	Data lansia berindikasi terlantar tersedia di tingkat RT/kelurahan untuk penanganan preventif

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Perencanaan program dimulai dari proses asesmen terhadap lansia yang dilaporkan masyarakat atau ditemukan di lapangan. Hasil asesmen menentukan alur penanganan: lansia yang masih berdaya diarahkan ke bidang pemberdayaan, yang sakit ke bidang perlindungan, dan yang memerlukan perawatan intensif dirujuk ke panti melalui LKS. Program disusun mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Langkah pertama setelah menerima laporan adalah memberikan layanan kesehatan, membuat identitas kependudukan jika belum ada, lalu merencanakan rujukan ke panti atau dikembalikan ke keluarga jika masih ada.

Staf Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial mengusulkan agar ke depan data lansia yang berindikasi terlantar sudah tersedia di tingkat RT/kelurahan sehingga penanganan dapat bersifat preventif, yaitu 2 hingga 5 tahun sebelum potensi keterlantaran terjadi. Namun demikian, pemungkinan masih perlu diperkuat karena masih terdapat lansia yang belum terjangkau akibat keterbatasan pendataan di tingkat komunitas, dan mekanisme pencegahan dini belum sepenuhnya terwujud.

3.2. Penguatan (*Empowering*)

Penguatan merupakan dimensi pemberdayaan yang bertujuan memperkuat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bagi lansia terlantar, penguatan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, dan penyuluhan kesehatan agar lansia mampu mengoptimalkan potensi yang masih dimilikinya (Suharto, 2017).

Tabel 3.
Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Lansia Terlantar

Kegiatan Penguatan	Pelaksanaan
Pembinaan Sosial	Dilaksanakan rutin di rumah singgah
Senam Lansia	Dijadwalkan per kecamatan tiap minggu
Kegiatan Harian	Berkebun dan bersih-bersih bagi lansia yang masih mampu secara fisik
Tim Kesehatan	Mengontrol kondisi lansia, merujuk ke Puskesmas/rumah sakit jika darurat

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Penyuluh Sosial Ahli Muda menjelaskan bahwa terdapat beberapa tim, antara lain tim kesehatan yang bertugas mengontrol kondisi lansia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hariastuti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa program *Elderly Golden Age School* (*EGAS*) efektif sebagai strategi promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia di Indonesia melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan. Bila kondisi darurat, dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit. Karena sifat penanganan bersifat sementara (rumah singgah), SDM difokuskan pada asesmen awal dan persiapan rujukan ke panti. Staf Pelaksana Bidang Rehabilitasi Sosial menambahkan bahwa kapasitas SDM untuk merawat lansia secara langsung masih terbatas, sehingga lansia yang diterima di rumah singgah harus relatif mandiri dalam hal-hal dasar seperti mampu mandi dan berpakaian sendiri.

Pembinaan sosial rutin dilaksanakan. Selama di rumah singgah, kegiatan harian seperti berkebun dan bersih-bersih dilaksanakan bagi lansia yang masih mampu secara fisik. Kegiatan ini bertujuan menjaga aktivitas fisik dan psikologis lansia agar tetap berdaya selama menunggu rujukan ke panti. Penerima manfaat (lansia terlantar) menyatakan bahwa mereka mendapat pelayanan kesehatan, pembinaan agama, serta merasa lebih tenang karena ada pendampingan dari petugas.

Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial dijadwalkan sesuai ketersediaan anggaran. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pembinaan dilaksanakan secara rutin, namun saat ini kegiatan yang berjalan adalah senam lansia yang dijadwalkan per kecamatan tiap minggu. Penjadwalan disesuaikan dengan kondisi lansia dan kuota panti. Pendataan berbasis DTKS dimanfaatkan sebagai teknologi basis data yang memungkinkan identifikasi sasaran penguatan secara lebih akurat. Namun demikian, penguatan yang diberikan masih belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran yang fluktuatif menyebabkan kegiatan penguatan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

3.3. Perlindungan (*Protecting*)

Perlindungan merupakan dimensi pemberdayaan yang bertujuan melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas, menghindari persaingan tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi. Bagi lansia terlantar, perlindungan diwujudkan melalui pemberian jaminan sosial, pemenuhan hak-hak dasar, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran (Suharto, 2017).

Tabel 4.
Sarana dan Prasarana Perlindungan Lansia Terlantar

Sarana/Prasarana	Fungsi	Kondisi
Rumah Singgah	Tempat penampungan sementara lansia menunggu antrian panti sosial	Tersedia, kapasitas terbatas
Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan	Makanan, tempat tidur, layanan kesehatan dasar	Tersedia, masih sederhana
Identitas Kependudukan	Difasilitasi pengurusan KTP oleh Dinas Sosial	Berjalan, perlu koordinasi dengan Dukcapil
Alat Bantu	Kursi roda, tongkat dapat diajukan melalui APBD/APBN	Tersedia sesuai kebutuhan

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara, 2026

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dinas Sosial Kota Jambi memiliki rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi lansia terlantar yang menunggu antrian masuk ke panti sosial. Penerima manfaat menyatakan bahwa kebutuhan makan terpenuhi dan merasa nyaman berada di rumah singgah Dinsos. Sebelumnya mereka tidak memiliki identitas kependudukan, namun kini telah dibantu pengurusan identitas oleh Dinas Sosial Kota Jambi, mendapat pelayanan kesehatan, pembinaan agama, serta merasa lebih tenang karena ada pendampingan dari petugas. Penelitian Sahar et al. (2018) menunjukkan bahwa kelompok swadaya (*self-help groups*) di komunitas perkotaan miskin Jakarta efektif mengurangi penelantaran dan meningkatkan dukungan sosial bagi lansia. Temuan ini relevan dengan konteks Kota Jambi yang juga menghadapi tantangan serupa.

Pernyataan penerima manfaat ini menunjukkan bahwa sarana yang tersedia telah memberikan perlindungan nyata bagi lansia terlantar. Pengurusan identitas kependudukan (KTP) yang difasilitasi oleh Dinas Sosial merupakan bentuk perlindungan krusial, karena tanpa identitas, lansia tidak dapat mengakses program jaminan sosial seperti BPJS dan PKH. Namun demikian, penerima manfaat juga menyatakan bahwa sarana yang ada masih sederhana dan mereka berharap dapat segera mendapat tempat di panti sosial untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dan teratur.

Upaya peningkatan sarana dilakukan melalui sinergi lintas sektor: BPJS untuk layanan kesehatan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan untuk pelatihan, serta Baznas untuk bantuan tunai bagi lansia yang masih memiliki tempat tinggal. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi menegaskan prinsip yang diterapkan, yaitu anggaran minimal dengan hasil maksimal melalui sinergi lintas sektor, di mana Dinas Sosial hanya berperan sebagai fasilitator dan koordinator.

Tabel 5.
Rasio *Input-Output* Program Perlindungan Lansia Terlantar

Aspek	Mekanisme
Basis Data	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai dasar pemetaan sasaran
Efisiensi Anggaran	Diukur dari jumlah lansia terlantar yang berhasil mendapat layanan rujukan
Optimalisasi	Melibatkan lintas sektor: BPJS, Dinas Ketenagakerjaan, LKS
Prinsip	Anggaran minimal, hasil maksimal melalui sinergi lintas sektor

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Dinas Sosial Kota Jambi telah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan sasaran program. Pendekatan berbasis data ini merupakan bentuk efisiensi dalam pemanfaatan anggaran karena memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mengatakan bahwa proses rehabilitasi diawali dengan pendataan dan asesmen untuk memetakan kondisi lansia. Anggaran yang ada dioptimalkan dengan melibatkan lintas sektor seperti BPJS, Dinas Ketenagakerjaan, dan lembaga sosial (LKS) agar pelayanan tetap maksimal meskipun anggaran terbatas.

Namun demikian, perlindungan belum menyeluruh karena kapasitas sarana yang terbatas, masih adanya lansia yang belum terdata, dan rasio *input-output* yang belum seimbang antara sumber daya yang tersedia dengan jumlah lansia yang membutuhkan perlindungan.

3.4. Penyokongan (*Supporting*)

Penyokongan merupakan dimensi pemberdayaan yang bertujuan memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Bagi lansia terlantar, penyokongan dilakukan melalui pendampingan sosial, rujukan ke panti sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pemberian bantuan sosial yang bersifat langsung (Suharto, 2017).

Tabel 6.
Alokasi Anggaran Program Penyokongan Lansia Terlantar

Aspek Anggaran	Mekanisme
Perencanaan	Berdasarkan data DTKS dan proyeksi jumlah lansia terlantar
Sifat Aanggaran	Dinamis mengikuti jumlah kasus yang masuk setiap tahun
Alokasi Utama	Kebutuhan pokok (makan) dan layanan kesehatan
Pengawasan	Internal (Dinsos), Inspektorat, BPKAD, BPK, BPKP
Kecukupan	Masih kurang mencukupi kebutuhan ideal

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Penelitian Asmorowati et al. (2024) mengungkapkan ketegangan antara kapasitas tata kelola pemerintah dan konseptualisasi perawatan lansia di panti jompo Indonesia, di mana sistem perlindungan sosial mengalami peregangan melampaui kapasitasnya. Temuan ini sangat relevan dengan kondisi Kota Jambi di mana kapasitas panti sosial terbatas dan LKS mengalami *overload*.

Anggaran direncanakan berdasarkan data DTKS dan proyeksi jumlah lansia terlantar. Basis data diperbarui secara berkala (DTKS yang kemudian berubah menjadi desil). Pengawasan penggunaan anggaran dilakukan secara internal (Dinsos), lembaga auditif Kota Jambi (Inspektorat, Baperinda, dan BPKAD), dan lembaga auditif dari pemerintah pusat (BPK dan BPKP) melalui laporan kinerja bidang. Penganggaran bersifat dinamis mengikuti jumlah kasus yang masuk setiap tahun. Anggaran untuk lansia terlantar sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pokok (makan) dan layanan kesehatan.

Namun demikian, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi mengakui bahwa anggaran yang ada dinilai masih kurang mencukupi kebutuhan ideal penyokongan lansia terlantar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menegaskan bahwa anggaran berubah-ubah setiap tahun dan sebagian besar masih dapat dikatakan kurang memadai karena jumlah lansia yang membutuhkan layanan cenderung meningkat, sementara anggaran tidak selalu bertambah secara proporsional. Kondisi ini mendorong Dinas Sosial Kota Jambi untuk mencari sumber pendanaan alternatif melalui koordinasi dengan Baznas, LKS, dan lintas OPD.

Tabel 7.
Perbandingan Biaya-Manfaat Program Penyokongan

Program	Penilaian Biaya-Manfaat
Bantuan Pangan Rutin	Paling *cost-effective*, program paling dasar yang tidak dapat dikurangi
Pendampingan Kesehatan melalui BPJS	Manfaat sepadan dengan biaya
Rujukan ke Panti Sosial	Paling efisien, perawatan lebih terstruktur dan komprehensif
Program Pemberdayaan Produktif	Kurang optimal karena keterbatasan pendampingan dan kondisi fisik lansia

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi menilai bahwa secara umum manfaat yang diterima lansia sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, terutama untuk program yang paling mendasar seperti pemenuhan pangan dan layanan kesehatan. Program yang dianggap paling *cost-effective* adalah bantuan pangan rutin dan pendampingan kesehatan melalui BPJS. Program pemenuhan pangan (makan sehari-hari) dianggap sebagai program paling dasar yang tidak dapat dikurangi. Selain itu, program rujukan ke panti sosial dinilai paling efisien karena perawatan di panti lebih terstruktur dan komprehensif dibanding penanganan di rumah singgah yang bersifat sementara.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menilai bahwa perbandingan biaya-manfaat cukup baik untuk program pemenuhan kebutuhan dasar. Namun untuk program pemberdayaan produktif, hasilnya kurang optimal karena keterbatasan pendampingan dan kondisi fisik lansia yang sebagian besar tidak lagi memungkinkan aktivitas ekonomi mandiri. Dari sisi penerima manfaat, Camat Kota Baru menyatakan bahwa bantuan sudah tepat sasaran karena identifikasi dilakukan langsung ke lapangan,

meskipun kadang ada yang tidak mampu mengambil bantuannya sendiri sehingga RT atau petugas yang mengantarkan.

3.4. Pemeliharaan (*Fostering*)

Pemeliharaan merupakan dimensi pemberdayaan yang bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks lansia terlantar, pemeliharaan diwujudkan melalui program-program yang berkesinambungan, monitoring dan evaluasi berkala, serta upaya memastikan bahwa lansia yang telah mendapatkan layanan tetap terjaga kondisi sosial dan kesehatannya secara berkelanjutan (Suharto, 2017).

Tabel 8.
Dampak Program Pemberdayaan Lansia Terlantar

Aspek Dampak	Perubahan Yang Terjadi
Identitas Kependudukan	Dari tidak memiliki KTP menjadi memiliki identitas
Pemenuhan Kebutuhan	Kebutuhan makan sehari-hari terpenuhi
Pendampingan	Ada pendampingan dan pembinaan dari petugas
Kondisi Kesehatan	Mendapat pelayanan kesehatan dan pembinaan agama
Kondisi Sosial	Lansia yang mendapat bantuan PKH dan rujukan ke panti membaik

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Berdasarkan wawancara dengan para penerima manfaat (lansia terlantar), terungkap berbagai dampak positif yang telah dirasakan dari program pemberdayaan Dinas Sosial Kota Jambi. Penelitian Suwana & Lily (2017) menekankan pentingnya pemberdayaan melalui literasi media digital, namun dalam konteks lansia terlantar di Kota Jambi, tantangan utamanya masih pada pemenuhan kebutuhan dasar dan identitas kependudukan. Penerima manfaat menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah mendapat bantuan apapun, namun kini kebutuhan makan sudah terpenuhi dan merasa nyaman berada di rumah singgah Dinsos. Sebelumnya mereka tidak memiliki identitas kependudukan, namun kini telah dibantu pengurusan identitas, mendapat pelayanan kesehatan, pembinaan agama, serta merasa lebih tenang karena ada pendampingan dari petugas.

Pernyataan penerima manfaat ini menggambarkan bahwa dampak program telah dirasakan secara nyata: dari tidak memiliki identitas menjadi memiliki KTP, dari tidak mendapat bantuan menjadi terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan dari kondisi terisolasi menjadi mendapat pendampingan dan pembinaan. Dari perspektif tokoh masyarakat, Camat Kota Baru menyatakan bahwa setelah mendapat program dari Dinsos, kondisi lansia terlantar umumnya membaik, terutama dalam hal kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 9.
Mekanisme Monitoring dan Keberlanjutan Program

Aspek Pemeliharaan	Mekanisme
Frekuensi Monitoring	Setiap 6 bulan untuk lansia yang sudah dirujuk atau diberdayakan
Indikator Keberhasilan	Jumlah lansia berhasil dipetakan, masuk panti, perubahan kondisi sosial dan kesehatan
Program Berkelanjutan	Pembinaan sosial, senam lansia, rujukan ke panti, bantuan PKH, kolaborasi Baznas
Evaluasi	Kunjungan berkala dan monitoring komprehensif

Sumber: Hasil Wawancara, 2026

Untuk menjaga keberlanjutan dampak program, Dinas Sosial Kota Jambi menerapkan mekanisme monitoring berkala. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyatakan bahwa monitoring dilakukan per 6 bulan untuk memantau perkembangan lansia yang sudah dirujuk atau diberdayakan. Indikator keberhasilan meliputi jumlah lansia yang berhasil dipetakan, jumlah yang berhasil masuk panti, serta perubahan kondisi sosial dan kesehatan yang terukur melalui monitoring berkala.

Mekanisme monitoring per 6 bulan ini merupakan bentuk konkret dari dimensi pemeliharaan setelah lansia mendapat layanan, Dinas Sosial tidak melepas begitu saja tetapi terus memantau kondisi mereka. Namun demikian, pemeliharaan masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat lansia yang belum terjangkau layanan, pendampingan intensif di lapangan belum optimal, dan akses informasi mengenai program belum merata bagi seluruh lansia terlantar di Kota Jambi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kota Jambi berjalan dengan pola yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Berbeda dengan Ningtihana et al. (2021) yang menemukan strategi utama berupa bantuan tunai di Kota Batu, penelitian ini menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi mengandalkan prinsip anggaran minimal dengan sinergi lintas sektor yang lebih kompleks. Berbeda pula dengan Wahyuni et al. (2023) yang mengkaji program terstruktur Istana Lansia di Kota Solok, penelitian ini menemukan pendekatan yang lebih bersifat responsif-berbasis kasus, mulai dari penjangkauan, asesmen, hingga rujukan atau pengembalian ke keluarga.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik pada penelitian ini adalah ditemukannya dualisme tantangan: di satu sisi Kota Jambi sebagai ibukota provinsi seharusnya memiliki kapasitas lebih baik, namun justru mencatat angka lansia terlantar tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa urbanisasi, modernisasi, dan bergesernya nilai kekeluargaan di perkotaan berkontribusi pada meningkatnya ketelantaran lansia. Faktor penghambat utama meliputi: (1) keterbatasan anggaran yang tidak proporsional dengan pertumbuhan kasus; (2) banyaknya lansia tanpa identitas kependudukan yang menghambat akses BPJS dan PKH; (3) stigma sosial yang mendorong penyerahan langsung ke panti tanpa asesmen; (4) hambatan komunikasi dengan lansia demensia; dan (5) keterlambatan pelaporan dari masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kota Jambi telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Dimensi pemungkinan dan penyokongan menunjukkan fondasi yang cukup kuat melalui kejelasan tujuan, perencanaan berbasis asesmen, dan alokasi anggaran terkontrol. Dimensi perlindungan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar melalui rumah singgah dan fasilitasi identitas kependudukan. Dimensi penguatan dilaksanakan melalui pembinaan sosial dan aktivitas fisik, meski kapasitasnya terbatas. Dimensi pemeliharaan diwujudkan melalui monitoring berkala enam bulan yang menghasilkan dampak positif bagi penerima manfaat.

Faktor pendukung meliputi koordinasi lintas sektor yang aktif (BPJS, Baznas, LKS, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dukcapil), partisipasi masyarakat melalui RT, TKSK, dan Posyandu Lansia, serta dukungan regulasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, banyaknya lansia tanpa identitas kependudukan, stigma sosial, hambatan komunikasi dengan lansia demensia, dan keterlambatan pelaporan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini dibatasi pada satu kota dengan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Data administratif yang tidak lengkap dan sulitnya menjangkau seluruh lansia terlantar yang belum terdata menjadi keterbatasan tambahan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed-methods* agar dampak program dapat diukur secara terukur dan hasilnya dapat digeneralisasi, serta mengembangkan model pemberdayaan lansia berbasis komunitas yang dapat diadaptasi daerah lain.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Abdurohim, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing, Dinas Sosial Kota Jambi beserta seluruh informan penelitian, jajaran Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat IPDN, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azidan, F., Islami, R., & Niko, N. (2023). Pemberdayaan Lansia Terlantar Di Rumah Bahagia Embung Fatimah Kota Tanjungpinang. *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak* , 2(2), 19–25 https://www.researchgate.net/publication/376140427_pemberdayaan_lansia_terlantar_di_rumah_bahagia_embung_fatimah_kota_tanjungpinang

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*. bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2024). *Open Data Provinsi Jambi - Data 2024: Jumlah Penduduk Kota Jambi 641,02 Ribu Jiwa*. jambiprov.go.id. https://opendata.jambiprov.go.id/publikasi/berita/44/data-2024-jumlah-penduduk-kota-jambi-64102-ribu-jiwa44

Bahrudin, E. A. A., & Hamid, A. (2025). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pondok Berdikari Tangerang. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2*. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1427

Hadipranoto, H., Satyadi, H., & Rostiana, R. (2020). Gambaran Kualitas Hidup Lansia Yang Tinggal Di Panti Sosial Tresna Wreda X Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *4*(1). https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i1.7535.2020

Hariastuti, I., Dawam, M., S.Sugiharti, T. Suratmi, Kurniasih, D. E., D. Budiningsari, W. Utomo, Muthmainnah , & Devi, Y. P. (2024*). Elderly Golden Age School (EGAS): A Strategy To Promote Health And Prosperity Elderly In Indonesia*. *Humanities And Social Sciences Communications*, *11*(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-03571-8

Martini, A. (2017). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2005). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Sage.

Miller, C. A., & Hunter, S. (2012). *Miller's Nursing For Wellness In Older Adults*. Lippincott Williams & Wilkins.

Mujiadi, Laga, Y., Sari, I. P., & Siti Rachmah. (2024). Optimalisasi Posyandu Lansia Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Lansia Di Mojokerto. *Dedikasi Saintek Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(3), 289–303. https://doi.org/10.58545/djpm.v3i3.435

Mulyana,M, Pawan, A. P., & Maabuat, E. E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Tondok Bakaru Di Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 16–32. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2797

Ningtihana, I. R., Cikusin, Y., & Abidin, A. Zainal. (2021). Strategi Dinas Sosial Kota Batu Dalam Meningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia) Terlantar. *Jurnal Respon Publik*, *15*(8), 51–56.

Rusmiyati, C. (2020). Kebutuhan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *19*(2).

Sahar, J., Riasmini, N. M., & Nurviyandari, D. (2018). Reducing Neglect And Improving Social Support For Older People Following A Self-Help Group In The Poor Urban Community Of Jakarta, Indonesia. *Enfermería Clínica*, *28*, 66–69. https://doi.org/10.1016/s1130-8621(18)30039-1

Sedarmayanti, & Hidayat, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

Suaib. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu : Penerbit Adab.

Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.

Sulikah Asmorowati, Schubert, V., & Eko Supeno. (2024). *Stretching The Social Protection System Beyond Capacity: Tensions Between Governance Capacity And Conceptualisations Of Elder Care In Nursing Homes In Indonesia. International Journal Of Sociology And Social Policy*, *44*(11/12), 1200–1218. https://doi.org/10.1108/IJSSP-12-2023-0322

Sundaro, H. (2022). Positivisme Dan Post Positivisme: Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Perencanaan Kota Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian. *Modul*, *22*(1), 21–30. https://doi.org/10.14710/mdl.22.1.2022.21-30

Suwana, F., & Lily. (2017). *Empowering Indonesian Women Through Building Digital Media Literacy*. *Kasetsart Journal Of Social Sciences*, *38*(3), 212–217. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.004

Suwarni, S., Kristiyanto, A., Anantanyu, S., & Lestari, A. (2026). *An Integrated 5I Health Promotion Model For Enhancing Independence And Quality Of Life Among Older Adults In Indonesia: A Community-Based Path Analysis Study*. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, *23*(3), 301. https://doi.org/10.3390/ijerph23030301

United Nations. *Department Of Economic And Social Affairs. Population Division. (2019). World Population Ageing, 2019 Highlights.* New York: United Nations. https://digitallibrary.un.org/record/3846855?v=pdf

Wahyuni, S., Fitri, W., & M. Fauzi. (2023). Pemberdayaan lansia terlantar melalui program istana lansia serambi madinah dinas sosial kota solok. *Tathwir Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *14*(1), 9–19. https://doi.org/10.15548/jt.v14i1.5944

Widjaya, A. W. (2012). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk : Natural Hazards, People's Vulnerability And Disasters : 2nd Ed.* Routledge.

World Health Organization. (2015). *World Report On Ageing And Health. In Apps.Who.Int. World Health Organization.*

Zulaikha, S, & Martini, A. (2023). *Organisasi Dan Manajemen Publik*. Bandung: Cendekia.